

PARTISIPASI SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DESA: MENILIK PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA NANGA RIYOI

Markus

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang

Abstrak; Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi sosial masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Nanga Riyoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam semi terstruktur. Subjek penelitian berjumlah empat orang, terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan dua orang Kepala Dusun. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Nanga Riyoi lebih kepada mobilisasi melalui pendekatan formal yaitu forum Musrenbang Desa yang didahului oleh pra-musrenbang di tingkat dusun melalui kegiatan sosialisasi ke dusun-dusun guna menjaring aspirasi. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya faktor yang krusial bagi partisipasi masyarakat, khususnya yang bersifat internal dari masyarakat itu sendiri yaitu bahwa wawasan mengenai pembangunan erat kaitannya dengan tingkat pendidikan warga. Selain itu, faktor komunikasi dari aparat desa dan kesadaran masyarakat untuk ikut memikirkan pembangunan di desanya adalah faktor yang juga turut mempengaruhi partisipasi sosial.

Kata Kunci: partisipasi sosial, perencanaan pembangunan infrastruktur, dukungan dan hambatan

Pendahuluan

Ketersediaan infrastruktur akan memberikan dampak pada sistem sosial dan sistem ekonomi yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu pembangun desa menuju desa mandiri harus juga memperhatikan pembangunan infrastruktur. Melalui infrastruktur, akses masyarakat desa terhadap sumberdaya dapat ditingkatkan sehingga tercipta efisiensi dan produktivitas menuju perkembangan ekonomi suatu kawasan. Selain menjadi penopang dalam sebuah sistem sosial dan sistem ekonomi, infrastruktur sekaligus menjadi penghubung dengan sistem lingkungan (Grigg dalam Cakrawijaya, 2014), dan oleh karenanya infrastruktur perlu dipahami sebagai dasar dalam mengambil kebijakan (Kodoatie, 2005).

Sementara itu, pembangunan infrastruktur pedesaan yang efektif bukanlah se-mata-mata karena adanya kesempatan melainkan merupa-kan hasil dari penentuan pilihan-pilihan

prioritas kegiatan. Artinya, pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, tujuan-tujuan yang hendak dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan. Dengan kata lain, meskipun perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur pedesaan meningkat melalui pendekatan anggaran, pada aspek implementasi hasilnya bisa berbeda. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya karena belum maksimalnya partisipasi masyarakat.

Salah satu fase dalam proses pembangunan infrastruktur pedesaan yang memerlukan partisipasi masyarakat adalah fase perencanaan. Perencanaan diperlukan untuk memberikan arah kepada Kepala Desa dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencapai visi dan misi Desa, menyelaraskan pelaksanaan pembangunan desa dengan kebijakan pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota.

Agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur perdesaan bisa tercapai dengan baik, hal yang paling dibutuhkan adalah partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat dalam proses perencanaannya. Masyarakat perlu dilibatkan secara langsung dalam proses perencanaan yang dilandasi oleh kesadaran dan bukan karena mobilisasi. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan, sehingga masyarakat pun menjadi peduli terhadap pembangunan yang ada. Masyarakat akan berperan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut karena mereka merasa bertanggungjawab atas pembangunan yang telah mereka rencanakan. Sudut pandang sosiologi bahkan cenderung melihat partisipasi masyarakat dalam urusan-urusan sipil sebagai indikasi bahwa demokrasi sudah berjalan baik, atau sebaliknya.

Konsep partisipasi banyak dikemukakan dalam literatur ilmu sosial dan pembangunan. Sejumlah ahli cenderung mengsihgunakan istilah partisipasi dan partisipasi sosial karena menganggap keduanya sinonim (Bowes, 2013). Namun dalam ilmu sosial, khususnya sosiologi, partisipasi sosial cenderung dikaitkan dengan konsep integrasi sosial, inklusi sosial atau aktivitas sosial (Koster, 2008) dan karenanya partisipasi sosial memiliki konotasi yang lebih spesifik.

Paling tidak terdapat tiga cara dalam melihat partisipasi sosial sebagai entitas yang terpisah yaitu: sebagai partisipasi konsumen, aktivitas sosial dan tingkat keterlibatan dalam masyarakat. Partisipasi sosial sebagai partisipasi konsumen adalah sebuah konsep yang dikaitkan dengan inklusi sosial dan gerakan berbasis hak. Institute for Social Participation menggambarkan partisipasi sosial sebagai hak dalam 'keterlibatan yang berarti dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan perencanaan, kesejahteraan diri dan masyarakat (Bathgate, 2011).

Menurut Institute for Social Participation, tiga komponen penting dalam deskripsi mereka tentang partisipasi sosial yang memungkinkan orang untuk mengalami mode keterlibatan sosial yang ditentukan sendiri: referensi pada konsep

modal sosial dan inklusi sosial, hak asasi individu untuk mengalami diri sendiri. menentukan mode keterlibatan dalam semua aspek masyarakat dan tanggung jawab sosial untuk menyediakan kondisi yang diperlukan untuk hal di atas. Penekanan pada keterlibatan aktif dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat adalah pusat dari perspektif partisipasi sosial ini. Penggunaan konsep partisipasi sosial sebagai aktivitas sosial membatasi partisipasi sosial pada interaksi diantara orang-orang. Beberapa penulis melihatnya sebagai keadaan objektif yang mengarah kepada jumlah kontak sosial atau jumlah aktivitas yang dilakukan seseorang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam semi terstruktur. Informan wawancara ditentukan secara purposif yang terdiri dari Kepala Desa Nanga Riyoi, Ketua BPD Nanga Riyoi dan dua orang Kepala Dusun. Tema pertanyaan difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur dasar di desa Nanga Riyoi, bentuk-bentuk dan mekanisme yang ditempuh guna menjangkau partisipasi hingga aspek-aspek yang bisa menghambat partisipasi masyarakat. Teknik analisa data yang menggunakan model interaktif dari (Miles Hubberman dan Saldana: 2014). Mengacu kepada kerangka konseptual penelitian, hasil analisa data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi. Dalam menganalisa data kualitatif yang bersumber dari wawancara mendalam, peneliti akan memperhatikan kata-kata, konteks dan konsistensi dari respon-respon yang diberikan oleh para informan.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Partisipasi

Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyarakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu dan merupakan bagian penting dalam proses dinamika

pembangunan. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan merupakan langkah awal akan terwujudnya pembangunan yang partisipatif dan demokratis dimana masyarakat diberikan kebebasan dan kesempatan untuk menyuarkan aspirasi mereka.

Sejalan dengan prinsip di atas, partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan pembangunan di Desa Riyoi Kecamatan Serawai sangat dibutuhkan agar program pembangunan yang sudah dirancang dan direncanakan sedemikian rupa dapat berjalan dengan baik sehingga hasilnya mampu mensejahterakan masyarakat setempat. Terkait dengan pentingnya elemen partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana Pemerintah Kabupaten harus melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal skala desa. Kewenangan itu perlu diperkuat melalui perencanaan partisipatif yang melibatkan masyarakat desa.

Partisipasi masyarakat dapat diekspresikan dalam berbagai bentuk dan tingkatan. Dusseldrop (Aprilia, 2015: 200) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: 1) menjadi anggota kelompok-kelompok di masyarakat; 2) melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; 3) melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain; 4) menggerakkan sumber daya masyarakat; 5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan 6) memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Bentuk-bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur desa ditemukan bahwa partisipasi berupa keterlibatan dalam memberikan buah pikiran. Sejauh ini

berbagai pemangku kepentingan di Desa Riyoi didorong dan dihimbau untuk ambil bagian dalam proses perencanaan pembangunan infrastruktur desa. Kepala Desa Riyoi, memberi ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Selama ini semua yang dikerjakan oleh pemerintah Desa sudah melibatkan masyarakat secara langsung. Begitu juga dengan BPD sudah menjalankan tugasnya seperti mewakili aspirasi masyarakat Desa dalam merumuskan perencanaan pembangunan.

Selama periode kepemimpinan Kepala Desa yang sekarang sudah terbangun beberapa infrastruktur fisik yang seluruhnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya. Infrastruktur tersebut mencakup Jalan Desa, Jalan Dusun, Jembatan dan Poskamling. Pembangunan infrastruktur desa sudah melalui musyawarah di tingkat desa berdasarkan pembahasan hasil pemetaan masalah dan potensi dari masing-masing RT dan dusun serta kelompok masyarakat juga menyepakati urutan daftar pembangunan berdasarkan penelaahan prioritas dan sesuai kemampuan dan kondisi keuangan Desa. Bentuk partisipasi masyarakat terakomodir dalam proses penjaringan aspirasi. Misalnya dalam pertemuan-pertemuan sebelum diadakan Musrenbang Desa. Pertemuan tersebut antara lain membahas pembentukan panitia dimana para Kepala Dusun terlibat dalam menentukan panitia Musrenbang Desa.

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembantuan infrastruktur di Desa Riyoi, aspirasi masyarakat diwadahi oleh BPD dimana tujuan musyawarah adalah untuk memilih dan menentukan secara tepat program pembangunan fisik yang dilakukan dengan segera dan untuk mengetahui mendesak tidaknya suatu suatu pembangunan bagi masyarakat untuk segera dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya diperoleh daftar urutan masalah untuk masukan penyusunan perencanaan pembangunan. BPD dalam hal ini berperan dalam menumbuhkan kesatuan pemahaman tentang urutan pembangunan yang ada di desa.

Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat. Hal ini terbukti salah satunya dari kedatangan masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa yang bertempat di kantor Desa. Terjadi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat walaupun masih terbilang tidak begitu banyak jumlah perbedaan dari tahun sebelumnya. Perbandingan yang ada yaitu kehadiran masyarakat pada tahun 2019 sebanyak 34 orang dan pada tahun sebelumnya sebanyak 29 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam proses pembangunan perlahan sudah mulai mengalami perubahan.

Terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Nanga Riyoi tersebut di atas, Kepala desa harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, proses yang melibatkan masyarakat ini, mencakup dengar pendapat yang dilakukan secara terbuka dengan sejumlah besar warganegara yang mempunyai kepedulian, dimana dengan pendapat ini disusun dalam suatu cara untuk mempercepat para individu, kelompok kepentingan dan para pejabat memberikan kontribusi mereka.

Ada tiga alasan utama pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yaitu pertama sebagai langkah awal untuk mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi dan merupakan satu cara untuk menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan, kedua sebagai alat untuk memperoleh informasi mengenai kebutuhan, kondisi, dan sikap masyarakat setempat. Ketiga, masyarakat memperoleh hak untuk urun rembuk dalam menentukan program-program pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dalam pasal 1 ayat 41 menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Desa

sebagai bagian terkecil dari pemerintahan mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan pemerintah desa yang paling dekat dan paling mengetahui segala kebutuhan masyarakatnya. Sehingga pemerintah desa dapat mengelola segala urusan Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), administratif dan pengelolaan keuangan yang berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Sebagaimana yang terkandung pada prinsip dari otonomi daerah dan Undang-undang Dasar, peraturan pemerintah (PP) dan Surat Edaran menteri dalam Negeri bahwa partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan di desa, yaitu untuk mengikutsertakan masyarakat dalam bidang pembangunan baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan.

Dalam tahap perencanaan pembangunan infrastruktur partisipasi masyarakat dapat diketahui melalui keaktifan menghadiri sosialisasi, musyawarah, penyuluhan, dan pelatihan yang diadakan pemerintah desa. Dalam tahap perencanaan tersebut masyarakat juga ikut menyumbang pikiran. Hasil dari partisipasi ini, merupakan terbentuknya organisasi kepengurusan tingkat desa.

Mekanisme Partisipasi

Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan. Untuk melaksanakan kewenangan lokal berskala desa tersebut, maka Pemerintah Desa perlu menyusun perencanaan desa yang melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Proses perencanaan yang baik akan melahirkan pelaksanaan program yang baik, dan pada gilirannya akan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan desa.

Pada kasus di Desa Nanga Riyoi, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Perencanaan dan Pembangunan Desa khususnya RPJMDesa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Masyarakat Desa Riyoi berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dan sejauh ini ada wadah yang memang dikhususkan untuk menampung aspirasi atau kemauan-kemauan masyarakat dalam tahap perencanaan pembangunan yaitu Musrenbang Desa. Andarita (2018) dmengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan melalui peningkatan modal sosial yang ada di masyarakat (Andarita, 2018 dan . Partisipasi masyarakat akan meningkat seiring meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap permukiman di sekitarnya serta meningkatnya keterlibatan dalam organisasi sosial.

Musrenbang Desa merupakan forum yang resmi bagi terjadinya dialog-dialog antara pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan di Desa Riyoi. Pada Musrenbang tersebut terjadi diskusi-diskusi dan kesepakatan-kesepakatan mengenai program pembangunan yang bisa memajukan masyarakat. Perwakilan masyarakat diberikan kesempatan untuk memaparkan masalah-masalah prioritas. Pada kegiatan Musrenbang Desa, pemandu mengajak peserta untuk menyampaikan tang gapan, masukan, saran, dan pemikiran terhadap isu-isu program/kegiatan pembangunan desa dengan merujuk kepadainformasi dari para narasumber (panelis).

{rogram-program pembangunan fisik pada Desa Riyoi dimana masyarakat terlibat dalam proses perencanaannya melalui mekanisme

Musrenbang Desa. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud antara lain Pembangunan Jembatan Sungai Hara sepanjang 36 meter. Selain itu ada pembangunan jalan rabat beton di Dusun Tunggal Pulang yang berada di RT. 002 dan pemeliharaan Jalan Desa serta pembangunan Pos Kamling. Semuanya merupakan kegiatan yang mengacu kepada rencana prioritas yang ditetapkan bersama masyarakat, khususnya BPD.

Terkait dengan Musrenbang, sebelum diadakan Musrenbang ada tahap pra Musrenbang. Pada tahap pra Musrenbang ini, pemerintah desa membentuk tim untuk penyelenggaraan Musrenbang dan tim pemandu untuk penyelenggaraan musrenbang yang berasal dari pihak Kecamatan, desa, dan juga melibatkan BPD sehingga ada koordinasi antara Camat, Pak Kepala Desa dan Ketua BPD.

Bentuk-bentuk pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di Desa Riyoi antara lain keikutsertaan dalam rapat-rapat desa. Bagi peserta yang aktif akan ada usulan-usulan yang dapat menjadi sumbangan pemikiran mengenai pembangunan desa di dalam rapat tersebut. Selain itu masyarakat ikut memutuskan apa yang akan dibangun sehingga perencanaan pembangunan melibatkan unsur masyarakat. Dikatakan bahwa perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas.

Terkait siapa-siapa yang diundang dalam Musrenbang aparat desa menentukan 22 undangan yang disebar untuk peserta yang terdiri dari aparat desa, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat secara umum. Pada Musrenbang desa tahun 2019 jumlah peserta yang hadir berjumlah 19 orang. Tingkatan kehadiran masyarakat sudah mengalami peningkatan. Berikut Tabel kehadiran pemangku kepentingan dalam Musrenbang Desa Nanga Riyoi Tahun 2019.

Tabel 1. Kehadiran Lembaga-lembaga Desa dan Masyarakat dalam Rapat Musrenbang Desa Riyoi 2019

No	Utusan	Jumlah Yang Diundang	Jumlah Yang Hadir
1	Aparat Desa	6	5
2	BPD	5	4
3	Kepala Dusun	2	2
4	Ketua RT	2	2
5	Tokoh Agama	2	2
6	Tokoh Adat	3	2
7	Perwakilan Perempuan	1	1
8	Perwakilan Pemuda	1	1
Jumlah		22	19

Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Nanga Riyoi, diolah.

Dari hasil pengumpulan data di atas, menunjukkan bahwa bentuk partisipasi dalam perencanaan pembangunan di Desa Riyoi tidak lain adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, kinerja dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa Riyoi. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan (minoritas, difabel, perempuan, dan miskin). Hal tersebut bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan oleh desa benar-benar bermanfaat bagi seluruh warga. Akan tetapi, hingga saat ini sebagian besar desa di Indonesia belum dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Hal ini terbukti dengan masih adanya desa yang melaksanakan perencanaan pembangunan secara elitis dan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah desa tanpa melibatkan masyarakat. Selain itu, ada pula desa yang sudah mencoba melibatkan masyarakat yakni melalui mekanisme “musrenbangdes”, namun belum semua komponen masyarakat diundang dalam “musrenbangdes” tersebut. Dampak dari perencanaan pembangunan yang belum bersifat partisipatif adalah manfaat pembangunan desa belum bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga program pembangunan belum dapat disebut berhasil.

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental dan spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Faktor Pendukung dan Penghambat Partisipasi

Pada pra musrenbang ada semacam pengkajian desa partisipatif, artinya siapa saja yang terlibat untuk mengetahui masalah kondisi desa sebenarnya agar disesuaikan dengan usulan-usulan yang telah disampaikan oleh masyarakat dalam musrenbang. Hal senada diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang peneliti wawancarai, bahwa warga memang diberi ruang untuk menyampaikan ide-ide terkait pembangunan. Namun diakui bahwa setiap usulan ditampung untuk mendapatkan kesepakatan, apakah usulan tersebut masuk dalam prioritas program pembangunan di desa. Proses ini menunjukkan bahwa partisipasi erat kaitannya dengan situasi saling ketergantungan, adanya kepercayaan dan jaringan organisasi sosial yang memfasilitasi kerjasama untuk manfaat bersama (Putnam dalam Suharto, 2009:95)

Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa berada pada kategori cukup aktif. Hal ini dibuktikan oleh banyaknya usulan yang datang dari masyarakat terkait apa saja yang perlu dibangun. Akan tetapi menurut warga yang aktif memberikan ide biasanya berkisar pada individu-individu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di desanya bisa dikategorikan dalam dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kesadaran/kemauan masyarakat itu sendiri beserta tingkat pendidikan. Faktor pendidikan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya berbagai perubahan. Jika dihubungkan dengan tingkat pendidikan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka kenyataan menunjukkan adanya hubungan yang erat. Masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi biasanya mempunyai perhatian yang besar terhadap kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan, baik pembangunan yang dilakukan pemerintah maupun yang merupakan swadaya masyarakat. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa betapa besar pengaruh pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Faktor-faktor tersebut sejalan dengan pendapat Slamet (2003:143) bahwa unsur-unsur internal sebagai dasar partisipasi juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat, yaitu kepercayaan diri masyarakat, solidaritas dan integritas sosial masyarakat, tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat serta kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan membangun atas kekuatan sendiri.

Meskipun ada forum penjangkaran aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu Musrenbang, dalam kenyataannya masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut berupa masalah komunikasi. Kesadaran masyarakat dan komunikasi yang terjalin masih perlu ditingkatkan lagi karena saat ini kerja sama antara pemerintah desa dengan masyarakat belum optimal. Untuk

penyusunan data mengenai informasi musrenbang dan mengenai draf awal RKP perlu dilakukan dari tingkat dusun melalui musyawarah dusun. Sebelum menyusun RKP tingkat desa, terlebih dahulu dusun membuat usulan kesepakatan yang akan diusulkan pada RKP di tingkat desa.

Masih terdapat sebagian warga desa yang meskipun telah diajak langsung dan telah disosialisasikan untuk ikut berpartisipasi, tetapi mereka tetap lebih memilih untuk bekerja dan ada juga yang mengatakan bahwa anggaran setiap pembangunan dari pemerintah sudah ada yaitu dana Desa. Segi positif dari partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam perencanaan adalah kuatnya dukungan terhadap program-program pembangunan yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan diantara warga masyarakat mengenai skala prioritas pembangunan yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama.

Dari hasil paparan diatas, menunjukkan bahwa partisipasi adalah proses aktif dimana inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dan dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) di mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subyek yang sadar. Partisipasi harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat.

Faktor internal, yaitu yang mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jumlah beban keluarga, jumlah pendapatan, dan pengalaman berkelompok. Faktor eksternal, yaitu hubungan yang terjalin antara pihak pengelola proyek dengan individu

yang dapat mempengaruhi partisipasi. Masyarakat akan dengan sukarela terlibat dalam suatu proyek jika sambutan pihak pengelola positif dan menguntungkan mereka. Selain itu, bila didukung dengan pelayanan pengelolaan kegiatan yang positif dan tepat maka warga masyarakat tidak akan ragu-ragu untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Faktor-faktor lain yang juga turut mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah motif, harapan, *needs*, *rewards*, dan penguasaan informasi. Faktor yang memberikan kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pengaturan dan pelayanan, kelembagaan, struktur dan stratifikasi sosial, budaya lokal, kepemimpinan, sarana, dan prasarana. Sedangkan faktor yang mendorong adalah pendidikan, modal, dan pengalaman yang dimiliki.

Kesimpulan

Bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Riyoi yaitu partisipasi aktif berupa usulan, saran, dan pendapat yang berhubungan penyelenggaraan pembangunan pada sektor ataupun bidang tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas pembangunan desa. Selain itu, mekanisme partisipasi yang ditempuh cenderung bersifat formal yaitu melalui pra Musrenbang dan Musrenbang dalam rangka pengumpulan informasi terkait prioritas pembangunan fisik di Desa Nanga Riyoi. Adapun faktor yang mendukung bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Riyoi yaitu keterbukaan dan komunikasi dari Pemerintah Desa melalui kegiatan sosialisasi. Sedangkan faktor penghambat yaitu masih lemahnya dukungan sumber daya manusia dikarenakan tingkat pendidikan sebagian masyarakat yang relatif masih rendah.

Dapat disarankan kepada Kepala Desa dan Ketua BPD agar penggalan aspirasi masyarakat lebih banyak dilakukan di tingkat dusun karena rentang kendalanya lebih dekat kepada masyarakat. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman warga

tentang proses perencanaan pembangunan belum merata oleh karena itu disarankan agar Kepala Desa dan BPD dapat melibatkan masyarakat sebanyak mungkin dalam Musrenbang Desa agar dapat menyerap aspirasi sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat yang nyata. Selain itu pihak Pemerintah Desa bisa lebih intensif dalam memotivasi warga untuk ikut berpartisipasi dalam memikirkan pembangunan di desa.

Daftar Pustaka

- Aprillia, T. dan, Krisnha. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung Alfabeta.
- Bathgate, T, Romios, P. 2011. *Consumer participation in health: Understanding consumers as social participants*. La Trobe University: Institute for Social Participation and Health Issues Centre.
- Bowes, A, McColgan, G. 2013. *Telecare for older people: Promoting independence, participation and identity. Res on Aging*.
- Cakrawijaya, M., Bambang Riyanto dan Nuroji. 2014. *Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota* vol. 25, no. 2, hlm. 137-156.
- Kodoatie, Robert. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Koster, M, Nakken, H, Pijl, SJ, van Houten, EJ, Lutje Spelberg, HC. 2008. *Assessing Social participation of pupils with special needs in inclusive education: the construction of a teacher questionnaire*. *Ed Res Eval*.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications.
- Slamet. 2003. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: Sebelas Maret
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.